

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hakekat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam pencapaian pembangunan nasional tersebut diperlukan suatu kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam berbagai bidang. Tahap pembangunan di berbagai daerah harus diutamakan demi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya memang lebih tua dari kebanyakan bangsa di barat atau timur yang kini termasuk bangsa modern. Namun, pengalamannya sebagai bangsa modern masih relatif singkat. Adapun ukuran modern memang tidak mudah diberikan kriterianya. Orang bisa bertanya apakah kita sebagai bangsa ingin modern ataukah ingin maju? Apakah kita harus melaksanakan berbagai program modernisasi untuk menjadi bangsa yang maju, atau kita harus membangun dan memajukan macam-macam bidang kehidupan agar kita bisa mencapai tingkat kemajuan yang disebut modern.

Nampaknya bagaimanapun setiap bangsa mempunyai ukuran-ukurannya sendiri yang menjadi pedoman pelaksanaan langkah-langkah pembangunannya. Meskipun ukuran-ukuran itu kadang-kadang masih bisa berubah karena terus menerus memerlukan penyempurnaan. Kita misalnya

olah semakin jauh dan terus menjauh ketika bangsa ini terus-menerus diterpa berbagai persoalan baik itu dilevel ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Fenomena kerusakan lingkungan yang kemudian berakibat pada timbulnya berbagai bencana alam diberbagai daerah, persoalan-persoalan disektor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, kriminalitas bahkan hingga persoalan luntarnya semangat nasionalisme, sudah menjadi hal yang tidak asing lagi dihadapan kita.

Bangsa ini memiliki sekian potensi, baik alam maupun potensi kewirausahaan masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian di sektor riil. Namun kemampuan masyarakat tersebut seringkali tidak terakomodasi dalam kebijakan publik yang dibuat oleh negara, jutaan sektor industri rakyat yang ditopang oleh sistem produksi dan distribusi saat ini tidak diperhatikan baik dari segi dukungan permodalan maupun jaminan pemasaran. Banyaknya impor ataupun penyelundupan barang dari luar negeri yang seharusnya bisa diproduksi didalam negeri sudah sangat mengkhawatirkan karena mampu mengancam sektor produksi dalam negeri. Peralatan pertukangan, perabot dapur, hingga alat tulis asing membanjiri pasar dalam negeri sehingga merugikan produsen barang domestik. Hal ini bukan semata-mata kualitas *made in indonesia* jelek, namun proses produksi massal di negara lain memungkinkan barang-barang tersebut dijual dengan harga yang sangat murah.

Dalam era globalisasi kemandirian daerah seperti saat ini, pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hakekat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam pencapaian pembangunan nasional tersebut diperlukan suatu kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam berbagai bidang. Tahap pembangunan di berbagai daerah harus diutamakan demi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya memang lebih tua dari kebanyakan bangsa di barat atau timur yang kini termasuk bangsa modern. Namun, pengalamannya sebagai bangsa modern masih relatif singkat. Adapun ukuran modern memang tidak mudah diberikan kriterianya. Orang bisa bertanya apakah kita sebagai bangsa ingin modern atautkah ingin maju? Apakah kita harus melaksanakan berbagai program modernisasi untuk menjadi bangsa yang maju, atau kita harus membangun dan memajukan macam-macam bidang kehidupan agar kita bisa mencapai tingkat kemajuan yang disebut modern.

Nampaknya bagaimanapun setiap bangsa mempunyai ukuran-ukurannya sendiri yang menjadi pedoman pelaksanaan langkah-langkah pembangunannya. Meskipun ukuran-ukuran itu kadang-kadang masih bisa berubah karena terus menerus memerlukan penyempurnaan. Kita misalnya

telah sepakat bahwa pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan manusia yang utuh dan pembangunan seluruh rakyat biasanya diartikan bahwa bidang-bidang kebutuhan manusia yang hendak dibangun itu harus seimbang baik material maupun spiritual. Dan pembangunan seluruh rakyat diartikan pembangunan yang merata atau pembangunan yang adil.

Dalam trilogi pembangunan kita sering mengatakan bahwa ketiganya sama pentingnya dan berkaitan satu sama lain. Hanya urutannya bisa kita ubah sesuai perkembangan, keadaan, dan dinamika kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu. Misalnya pada saat kita memulai pelita I (1969-1974). Trilogi pembangunan, kita pahami sebagai pengutamakan stabilitas lebih dahulu, yang mutlak perlu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Baru sesudah keduanya terwujud kita bisa memikirkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Pada awal tahun 1950-an segera setelah kemerdekaan Indonesia diakui oleh bangsa-bangsa diseluruh dunia terutama oleh Belanda sebagai bekas penguasanya selama 3,5 abad, maka timbulah keinginan untuk membangun agar bangsa Indonesia bisa maju, tidak terbelakang, dihormati oleh bangsa-bangsa lain yang sudah maju atau yang sudah merdeka lebih dulu. Tetapi antara keinginan untuk segera maju dan realita tantangan yang dihadapi pada awal kemerdekaan terdapat kesenjangan yang besar, sangatlah sulit bagi

bangsa Indonesia yang baru saumur isama

Berpedoman pada Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai dasar konstitusional dan Garis-Garis Besar Haluan Negara yang setiap lima tahun mengalami revisi sebagai landasan operasionalisasi, pembangunan dijalankan. Sedangkan materi konstitusional secara umum merupakan acuan dari segala aktifitas perekonomian bangsa dapat dicermati dari bunyi pasal 33 (1,2,3) UUD 1945. pasal ini secara khusus merupakan dasar penting karena didalamnya menjelaskan landasan dan titik tolak pembangunan di Indonesia¹. *Pasal 1* menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. *Pasal 2* menjelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. *Pasal 3* berbunyi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Ketiga falsafah itu dijelaskan lebih lanjut dalam GBHN dengan menyebut delapan modal dasar yang dimiliki bangsa Indonesia dalam melakukan pembangunan².

1. kemerdekaan dan kedaulatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia setelah lepas dari kolonialisme selama tiga abad lebih.
2. Eksistensi geografis Indonesia dengan potensi sumber daya alam strategis yang bernilai tinggi.
3. Sumber-sumber kekayaan alam yang memberikan kontribusi penting dalam penyelenggaraan pembangunan.

¹ Herbert Fritsch, *Social and Economic Policy in Indonesia* (London: Routledge, 1967), hal. 10.

4. Besarnya kuantitas penduduk dimanfaatkan sebagai sarana pendukung usaha-usaha pembangunan disegala bidang.
5. Model rohaniah dan mentalitas, yakni kepercayaan kepada tuhan YME dan kesetiaan kepada bangsa atas kebenaran falsafah pancasila.
6. Pluralitas kebudayaan bangsa yang berkembang diseluruh penjuru nusantara sebagai kekayaan bangsa.
7. Potensi efektif bangsa yang di produk dari sepanjang perjalanan sejarah, khususnya kekuatan sosial politik.
8. Keberadaan angkatan bersenjata Indonesia atau sekarang TNI yang berfungsi sebagai kekautan pertahanan dan keamanan.

Dalam banyak materi GBHN yang disuguhkan, dijelaskan bahwa potensi pembangunan yang diselenggarakan Indonesia harus bersemangatkan pancasila, sebuah fase yang kemudian hari di spesifikasikan menjadi sebuah demokrasi. Dimana memposisikan rakyat sebagai pelaku utama. Demokrasi menuntut peran serta rakyat berpartisipasi dalam pembangunan dan meletakkan rakyat sebagai aktor utama dalam merealisasikan keseluruhan ide dan gagasan pembangunan. Pembangunan yang bermula dan berpulang ke pangkuan rakyat dan menghadirkan rakyat sebagai subyek dan bukan obyek. Dengan demikian secara politis kebijakan-kebijakan pembanguna mesti berpihak kepada rakyat, disamping juga harus tetap bersumber pada rakyat.

Seperti dijelaskan dalam GBHN bahwa demokrasi ekonomi mempunyai cirri-ciri positif dan negatif. Cirri-ciri positif yang terkandung dalam sitem demokrasi ekonomi yang harus ditambahkan seperti

1. Isi dari UUD 1945 pasal 1,2,dan 3.
2. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan sepenuhnya oleh pemerintah dengan kesepakatan-kesepakatan lembaga permusyawaratan rakyat.
3. Adanya kebebasan bagi rakyat untuk memilih identitas pekerjaan yang dikehendaki demi kelayakan hidupnya.
4. Pengakuan terhadap hak milik perorangan asal pemanfaatannya tidak mengganggu kepentingan orang banyak.
5. Fakir miskin dan anak-anak terlantar diberikan penghidupan serta dipelihara oleh Negara.

Sedangkan cirri-ciri negatif, *Free Fight Liberalism*, *etatisme* dan *monopoli* harus dihindarkan sebab ketiganya bersifat kontradiktif dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Namun yang terjadi dapat kita lihat dengan jelas bahwa sekian banyak cirri-ciri positif yang selalu dicanangkan oleh pemerintah justru melenceng tajam. Demokrasi berubah menjadi ajang eksploitasi adanya dominasi Negara dan aparturnya yang sangat menguasai ragam kepentingan publik yang kemudian tidak digunakan untuk kepentingan rakyat. Korupsi merebak dimana-mana dan mulai muncul realitas pemusatan ekonomi pada suatu kelompok tertentu yang mempunyai akses politik yang itu sangat merugikan perimbangan dan kesempatan yang ada.

Kelahiran orde baru adalah pemicu gagasan pembangunan yang kemudian dimaknai sebagai pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah

Orba mulai membangun demokrasi ekonomi dengan membuka pintu modal asing dan menggali sumber daya alam seluas-luasnya. Dengan mendapat dukungan dari para teknokrat, militer, birokrat, dan pemilik modal asing domestik sebagai prioritas utama pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi menjadi pilihan strategis, karena kesadaran bahwa dengan mengambil pilihan ini maka keinginan untuk mengejar dan memperbaiki kondisi ekonomi yang rusak bisa terpenuhi. Padahal dengan memantapkan diri pada pembangunan ekonomi (pertumbuhan), maka secara otomatis Orba telah memilih strategi yang tidak lagi memperdulikan keadilan dalam pembagian dalam hal perekonomian nasional.

Seperti yang kita singgung sebelumnya, untuk pemerintah Orba berusaha untuk mendatangkan investasi asing sebesar-besarnya untuk segera memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk itu pemerintah Orba berusaha untuk memberikan kemudahan dan keistimewaan-keistimewaan seperti pajak yang lebih rendah, dibanding dengan Negara lain. Selain itu Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) diciptakan dengan memberi intensif seperti³.

1. Pembebasan pajak terhadap keuntungan perusahaan selama enam tahun bagi proyek-proyek yang diutamakan *tax holiday* ini kemudian dapat diperpanjang oleh pemerintah.
2. Pembatasan dari pajak deviden untuk periode yang sama.
3. Pembebasan pajak material modal pada saat investasi.

³ Mochtar Mas'ood, *Ekonomi Dan Struktur Politik Orde Baru, 1966-1971*, Jakarta: LP3S, 1980

4. Pembebasan dari bea masuk impor untuk peralatan mesin, alat-alat dan kebutuhan awal pabrik.
5. Hak mentransfer keuntungan yang sedang berlangsung dalam mata uang asal.

Dalam perkembangannya, investasi asing yang masuk ke Indonesia terus mengalir dengan deras. Tidak hanya pada sektor Negara, namun juga pada sektor swasta. Pada sektor Negara investasi asing masuk sebagai modal penopang pembangunan yang telah direncanakan teknokrat dan militer dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan. Modal dari investasi asing banyak dialokasikan pada pengusaha-pengusaha yang dekat dengan pemerintah.

Fenomena yang sering disebut sebagai *rent seeking* ini menyebabkan hutang luar negeri setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun demikian hasil yang dicapai belum dapat dirasakan oleh rakyat.

Gambaran perekonomian Indonesia yang sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme secara jelas mengakibatkan birokrasi yang sangat boros dengan pembiayaan perekonomian yang sangat tinggi.

Kondisi moneter dan perbankan Indonesia dalam tahun 1997 lebih di dominasi oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap US\$ sejak 21 Juli 1997. walaupun sejak 1998 otoritas moneter terus memelihara kondisi kesehatan perbankan, namun merosotnya nilai tukar rupiah mempunyai dampak yang luas terhadap kestabilan sistem

Selama 10 tahun terakhir sebelum terjadi krisis pada tahun 1997, depresiasi nilai tukar rupiah selalu dapat dikendalikan pada tingkat yang paling rendah, rata-rata 6 % per tahun. Namun, secara drastis posisi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi pada bulan juli tahun 1997. gejolak moneter pada tahun 1997 telah menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami depresiasi 26 %⁴.

Kondisi ini secara langsung akan membawa dampak terhadap pembayaran luar negeri, terhadap utang luar negeri yang berjangka pendek, sementara impor menjadi sangat mahal. Dalam kondisi ini, mengapa ekspor tidak menjadi efektif? Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan bahan pelengkap atau bahan dasar impor, karena ongkos produksi menjadi mahal.

Sejak terjadi krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan resesi, banyak yang mengkritik bahwa pemerintah tidak mempunyai konsep yang jelas untuk mengangkat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri dan sejahtera.

Nafsu mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa ditopang oleh tabungan nasional yang mencukupi, melahirkan kebijaksanaan mencari dana luar negeri dalam bentuk apapun. Hasilnya memang sangat menakjubkan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, bahkan sempat disebut dengan julukan keajaiban ekonomi.

Secara teoritis, pengertian pembangunan secara umum adalah proses pertumbuhan menuju pada kemakmuran. Berulang kali hal ini dibicarakan pada pembahasan sebelumnya. Lantas bagaimana memahami krisis yang terjadi di Indonesia. Apakah selama 32 tahun Indonesia mengagungkan pembangunan yang tidak ada hasilnya.

Pada satu sisi pembangunan di Indonesia mendorong pada industrialisasi, namun mayoritas yang agraris, tidak dapat diubah begitu saja menjadi masyarakat industri tanpa peningkatan keterampilan dan pendidikan yang memadai.

Segala prestasi yang telah dicapai pada Orde Baru, secara ukuran statistik memanglah menakjubkan. Namun dibalik prestasi tersebut, distribusi dan transformasi masih jauh dari ideal. Penyimpangan-penyimpangan terjadi dalam pasar, perekonomian dan pembangunan secara umum. Hal ini termasuk pemberian investasi pada sektor yang salah, yang hanya menyebabkan konglomerasi ekonomi yang memusat.

Pembangunan kesejahteraan sosial kerap dipandang hanya sebagai beban pertumbuhan ekonomi dan sebagai intervensi Negara, maka berkembanglah suatu keyakinan nihilitas bahwa institusi-institusi kesejahteraan sosial secara intrisik bersifat tidak ekonomis dan bahkan patologis, dimanapun dan dalam kondisi apapun.

10 tahun era reformasi berjalan di Indonesia semenjak lengsernya kepemimpinan Orde Baru dibawah Alm. Jendral Soeharto pada tanggal 10

Mei 1998, namun perubahan yang selama ini kita harapkan ternyata masih

olah semakin jauh dan terus menjauh ketika bangsa ini terus-menerus diterpa berbagai persoalan baik itu dilevel ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Fenomena kerusakan lingkungan yang kemudian berakibat pada timbulnya berbagai bencana alam diberbagai daerah, persoalan-persoalan disektor sosial-ekonomi seperti kemiskinan, kriminalitas bahkan hingga persoalan luntarnya semangat nasionalisme, sudah menjadi hal yang tidak asing lagi dihadapan kita.

Bangsa ini memiliki sekian potensi, baik alam maupun potensi kewirausahaan masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian di sektor riil. Namun kemampuan masyarakat tersebut seringkali tidak terakomodasi dalam kebijakan publik yang dibuat oleh negara, jutaan sektor industri rakyat yang ditopang oleh sistem produksi dan distribusi saat ini tidak diperhatikan baik dari segi dukungan permodalan maupun jaminan pemasaran. Banyaknya impor ataupun penyelundupan barang dari luar negeri yang seharusnya bisa diproduksi didalam negeri sudah sangat mengkhawatirkan karena mampu mengancam sektor produksi dalam negeri. Peralatan pertukangan, perabot dapur, hingga alat tulis asing membanjiri pasar dalam negeri sehingga merugikan produsen barang domestik. Hal ini bukan semata-mata kualitas *made in indonesia* jelek, namun proses produksi massal di negara lain memungkinkan barang-barang tersebut dijual dengan harga yang sangat murah.

Dalam era globalisasi kemandirian daerah seperti saat ini, pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak

bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Sehingga otonomi menjadi salah satu upaya yang benar-benar harus diwujudkan, meskipun sulit dan banyaknya hambatan yang akan dihadapi.

Menguatnya arus globalisasi dan liberalisasi di beberapa sektor melahirkan kesempatan-kesempatan dan pilihan-pilihan baru dalam berbagai bidang pembangunan. Namun demikian kapitalisme sebagai anak kandung globalisasi dan sekaligus poros dari liberalisasi, juga menciptakan tantangan-tantangan baru dalam pembangunan.

Dalam konteks Indonesia, otonomisasi daerah tidak bisa dilepaskan dari menguatnya arus globalisasi dan kapitalisme. Pemahaman dan pemaknaan yang keliru mengenai globalisasi dan liberalisasi bukan saja memberi implikasi negatif bagi pembangunan di daerah. Terutama dalam hal peningkatan taraf hidup, ekonomi, politik dan budaya, melainkan pula dapat berubah menjadi gerakan berbahaya bagi pembangunan nasional maupun daerah yang berkeadilan sosial dan merata demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan terbebas dari jerat jarring-jaring kemiskinan.

Melalui era otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka provinsi Banten sebagai provinsi yang baru terbentuk pada tahun 2000 berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2000 mengenai bentuk, lingkup dan pembagian

lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kebijakan pembangunan secara otonom.

Sebagai provinsi yang baru saja berdiri, tentu saja provinsi Banten mempunyai beberapa persoalan yang harus segera dituntaskan untuk menuju Banten yang sejahtera. Dapat kita ambil contoh seperti permasalahan kemiskinan di provinsi Banten yang sangat sulit sekali untuk ditanggulangi.

Hal ini dapat dilihat dari table 1.1 :

Tabel 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Banten
Menurut Daerah Tahun 2002-2005

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2001	570,7	853,3	1.424,0	12,84	22,83	17,24
2001	305,8	480,9	766,6	6,47	12,64	9,22
2003	309,4	546,4	855,5	6,62	12,76	9,66
2004	279,9	499,3	779,2	5,69	11,99	8,58
2005	370,2	460,3	830,5	6,56	12,34	8,86

Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Banten

Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menyebutkan dengan angka bahwa angka kemiskinan dari tahun 2000-2005 di provinsi Banten mengalami fluktuasi atau naik turun. Pada tahun 2000 penduduk miskin ada sebesar 1.424.000 orang, turun drastis pada tahun 2002 menjadi 786.700 orang. Pada tahun 2003 kembali naik sedikit menjadi 855.000 orang. Pada tahun 2004 penduduk miskinnya semakin berkurang hingga masih ada sebesar 779.200 orang. Sehingga secara persentase penduduk miskin menurun dari 17,24 persen menjadi 8,58 persen pada periode yang sama. Namun pada tahun 2005, terjadi kembali sedikit kenaikan jumlah penduduk miskin, menjadi 830.500

(8,86 persen). Bertambahnya jumlah penduduk miskin lebih banyak terjadi pada daerah perkotaan yang terjadi kenaikan hampir 100.000 orang. Pada tahun ini kenaikan jumlah penduduk miskin diduga terjadi akibat kenaikan harga BBM (tahap 1) pada bulan Maret 2005, yang masih masuk dalam periode penghitungan tahun 2005.⁵

Melihat angka kemiskinan yang naik turun di provinsi Banten, dapat dikatakan bahwa kemiskinan di propinsi Banten masih cukup tinggi. Hal ini diperkuat dengan fakta yang terjadi sekarang ini, seperti persoalan busung lapar, kekurangan pangan, pengangguran, tidak mampunya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, telur, minyak dll, dan pendapatan ekonomi masyarakat yang masih dibawah rata-rata seperti tidak menentunya penghasilan masyarakat yang masuk dalam kategori miskin dimana mereka berpenghasilan dibawah Rp. 20.000. hal ini dikarenakan karena hampir semua masyarakat sebagai buruh tani yang penghasilannya tidak menentu.

Dari permasalahan ini pemerintah provinsi Banten sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menjalankan pemerintahan dan sebagai pembuat kebijakan seharusnya bertanggungjawab. Oleh karena itu pemerintah provinsi Banten mempunyai salah satu prioritas utama untuk menaggulangi permasalahan tersebut.

Adapun strategi dari pembangunan provinsi Banten yang sesuai dengan Rencana Strategi Provinsi Banten (RENSTRAP) tahun 2002-2006

berkaitan dengan pemulihan krisis dan pembangunan ekonomi adalah
*“Pemberdayaan Sektor Usaha Kecil Menengah dan Ekonomi Rakyat”*⁶

Konsep pembangunan ekonomi berdasarkan sistem kerakyatan yang dikenal dengan istilah koprasidiprakarsai oleh pemerintah. Kemudian tumbuh berkembang seiring dengan partisipasi masyarakat terhadap dunia perkoprasian nasional sebagai soko guru perekonomian bangsa. Hanya saja yang harus digaris bawahi adalah bahwa prakarsa yang sangat bernilai bagi perekonomian bangsa tersebut, dalam perjalanannya di implementasikan secara berbeda. Koprasidiprakarsai yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak roda perekonomian berdasarkan prinsip kerakyatan yang berkeadilan, ternyata tidak cukup kokoh dalam membangun fundamen perekonomian nasional. Hal tersebut lebih disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- Paradigma dalam pengembangan dan pemberdayaan koprasidiprakarsai lebih mengutamakan pertumbuhan secara kuantitas yang diprakarsai oleh pemerintah daripada tumbuh atsinisiatif masyarakat (Top Down Paradigm). Hal tersebut didukung oleh sebuah kenyataan bahwa pemberdayaan koprasidiprakarsai yang dilakukan selama ini oleh pemerintah lebih sering dilakukan melalui mekanisme pemberian insentif, fasilitas, dan subsidi, sehingga gagal membangkitkan kemandirian, profesionalisme dan daya saing yang tangguh.
- *Top Down Paradigm* tersebut pada kelanjutannya menghasilkan kenyataan praktek-praktek eksploitasi terhadap koprasidiprakarsai itu sendiri,

⁶ RENSTRA Provinsi Banten Tahun 2002-2006

dimana banyak koperasi yang berdiri bukan didasari oleh kesadaran akan pembangunan ekonomi kerakyatan dengan berusaha mensejahterakan para anggota dari koperasi itu, tetapi lebih pada bagaimana mendapatkan subsidi dan insentif yang diberikan oleh pemerintah.

Paradigma pengembangan dan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) juga tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada dunia koperasi nasional. Selain volume pembinaan terhadap UKM tersebut dirasakan sangat kecil, juga pendekatan pengembangannya masih mengandalkan berbagai fasilitas dari pemerintah sehingga berakibat pada ketidakmakmuran UKM serta tidak tumbuhnya profesionalisme yang berjuang pada ketidakmampuan UKM dalam meraih pasar potensial dalam dunia persaingan usaha yang semakin ketat. Pola kemitraan yang diprakarsai oleh pemerintah dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan UKM menjadi tidak berjalan secara utuh sesuai yang diharapkan dalam pelaksanaannya, karena faktor dari isu kemandirian dan profesionalisme tersebut.

Pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) lebih mengarah kepada upaya penciptaan kemandirian, profesionalisme, daya kreatif dan inovatif pelaku usaha sektor koperasi dan usaha kecil menengah. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai motivator, regulator, dan fasilitator yang bersifat stimulan yang mendukung upaya penciptaan iklim usaha yang sehat, peningkatan akses terhadap sumber daya

dan peningkatan kewirausahaan yang menuju pada kemandirian dan profesionalisme KUKM itu sendiri.

Dari strategi pembangunan provinsi Banten diatas, maka bidang pemberdayaan sektor usaha kecil menengah dan perekonomian rakyat merupakan salah satu kewenangan wajib dan menjadi prioritas program pembangunan yang harus dilakukan pemerintah daerah Provinsi Banten. Karena pemberdayaan sektor usaha kecil menengah dan ekonomi rakyat sangat berperan dalam pembangunan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan. Sehingga untuk memandang masalah-masalah dalam pemberdayaan sektor usaha kecil menengah dan perekonomian rakyat tersebut, diperlukan suatu penanganan reformasi kebijakan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh baik dalam konsep maupun penyelenggaraannya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah diatas, maka munculah permasalahan yang nantinya akan diteliti oleh penulis, yaitu :

- 1. Bagaimana implementasi strategi pemberdayaan sektor usaha kecil menengah dan ekonomi rakyat di Provinsi Banten tahun 2006?*
- 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi strategi pemberdayaan sektor usaha kecil menengah dan ekonomi rakyat di Provinsi Banten tahun 2006?*

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi strategi pemberdayaan sektor usaha kecil menengah dan ekonomi rakyat di Provinsi Banten.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi strategi pemberdayaan sektor usaha kecil menengah dan ekonomi rakyat di Provinsi Banten tahun 2006.
- c. Sebagai sebuah bentuk uji materi terhadap apa yang selama ini penulis peroleh di dalam dunia akademik.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan memberikan manfaat :

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang bagaimana teori yang selama ini didapat dari bangku kuliah dapat diterapkan di kehidupan masyarakat.

b. Bagi Universitas

Untuk menambah bahan bacaan serta memberikan masukan sosial politik yang berkaitan dengan pemberdayaan sektor usaha kecil menengah dan ekonomi rakyat di Provinsi Banten serta menambah referensi skripsi pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah

D. KERANGKA DASAR TEORI

1. Manajemen Strategis

Manajemen strategis secara sederhana dapat dimengerti sebagai keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemimpin yang bakal menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang⁷.

Model atau proses manajemen strategis terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

- Formulasi strategi,
- Implementasi strategi,
- Kontrol dan evaluasi.

1. Formulasi strategi terbagi kedalam beberapa unsur yaitu :

- Analisis lingkungan, yang meliputi analisis lingkungan *eksternal* dan lingkungan *internal*.
- Visi dan misi.
- Objektives, dalam kerangka menentukan dimensi mutu dan atau kepuasan *stakeholders*.
- Strategi-strategi.
- Kebijakan-kebijakan.

2. Implementasi strategi terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- Program dan kegiatan.
- anggaran, prosedur dan instruksi kerja.

⁷ Drs. Ilung Prihadi, *Diktat Mata Kuliah Manajemen Strategis*

3. Kontrol dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja organisasi.

Dalam konteks manajemen strategis ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah *cara-cara yang merupakan alternatif yang dapat dipilih dan diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi*⁸.

Kriteria yang dipertimbangkan untuk menyeleksi alternatif strategi yang baik adalah :

- 1) *Management's attitude towards risk* (sikap pemimpin untuk mengambil resiko)
- 2) *Influence from the organization culture* (budaya yang mempengaruhi organisasi)
- 3) *Pressure from the external environment* (tekanan dari lingkungan eksternal)
- 4) *Personal needs* (kebutuhan pribadi / kepentingan pribadi)
- 5) *Desires of key leaders* (pengambilan keputusan pemimpin)

Pada dasarnya, strategis merupakan garis besar (*out line*) respon organisasi terhadap tantangan-tantangan mendasar yang dihadapi. Oleh karena

itu, strategi harus dimusnahkan sebagai dasar untuk menentukan arah

Dalam perumusan strategi ini dilakukan pendekatan lima tahapan proses perumusan strategi sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi alternatif-alternatif umum yang dapat digunakan untuk menjawab isu-isu strategis.
2. Mempelajari kendala-kendala yang kemungkinan muncul dalam pelaksanaan alternatif-alternatif tersebut.
3. Merumuskan usulan-usulan utama yang dapat digunakan untuk mewujudkan alternative-alternatif tersebut, sekaligus mengantisipasi kemungkinan kendala-kendala yang ada.
4. Merumuskan kegiatan utama apa yang harus dilakukan dalam lima tahun kedepan.

b. Kebijakan

kebijakan (*policy*) merupakan serangkaian alternatif yang dibangun oleh para pengambil keputusan dalam rangka memecahkan suatu permasalahan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu dalam kerangka menindaklanjuti strategi yang dipilih. Kebijakan menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan.

Kebijakan dapat berupa :

- 1) Kebijakan publik
- 2) Kebijakan strategis (menjabarkan strategi-strategi yang telah dipilih)
- 3) Kebijakan teknis (sumberdaya manusia, keuangan, peralatan dll

2. Neoliberalisme

Neoliberalisme merupakan tahap lanjutan dari liberalisme yang berkembang sekitar abad 18 sampai 19 di Barat. Liberalisme asal mulanya adalah bentuk perjuangan kaum borjuis dalam menghadapi kaum konservatif atau feodal. Sehingga boleh disebut, liberalisme merupakan ideologi kaum borjuis kota. Dalam arti luas, liberalisme adalah *paham yang mempertahankan otonomi individu melawan intervensi komunitas*. Memang, dalam konteks definisi ada "*civic liberalism*" maupun liberalisme ekonomi. Dan, liberalisme ekonomi inilah yang nantinya berkembang menjadi neoliberalisme⁹.

Pada intinya, paham ini memperjuangkan *laissez faire* (persaingan bebas), yakni paham yang memperjuangkan hak-hak atas pemilikan dan kebebasan individual. Mereka lebih percaya pada kekuatan pasar untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial ketimbang melalui regulasi negara. Kata *neo* dalam neoliberalisme yang kita bahas ini merujuk pada bangkitnya kembali bentuk baru aliran ekonomi liberalisme lama yang dulu dibangkitkan ekonom Inggris Adam Smith dalam karyanya "*The Wealth of Nations*" (1776), di mana dia dan kawan-kawannya menggagas penghapusan intervensi pemerintah dalam ekonomi.

Ketika depresi ekonomi melanda dunia, muncul seorang ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes, yang menantang paham liberal. Keynes mengembangkan gagasan alternatif bahwa pemerintah dapat dan harus

⁹ Zaenal Mularif, *Ekonomi Kesejahteraan di Tengah Arah Kapitalisme Global*, p. 101

melakukan intervensi dalam perekonomian, dan membangun sebuah model yang sama sekali baru. Ekonomi Keynesian yang sering disamakan dengan *Welfare State* (Negara Kesejahteraan, yaitu pemilikan negara atas sebagian besar industri dan pemerintahan yang intervensionis) itu mempengaruhi Presiden Roosevelt untuk melahirkan kebijakan yang dikenal dengan program “*New Deal*”, karena dianggap berhasil menyelamatkan rakyat Amerika waktu itu. Sejak itu pula peran pemerintah atau negara dalam ekonomi makin dapat diterima, makin menguat dan menenggelamkan paham liberalisme. Kebanyakan negara berkembang juga menganut strategi pembangunan yang didominasi oleh negara (*welfare state*)¹⁰.

Di tengah dominasi sistem ekonomi neoliberal (kapitalisme global), terminologi keadilan, pemerataan, kesejahteraan dan sejenisnya tidak lagi mendapat tempat. Terminologi tersebut lebih berfungsi sebagai slogan politik ketimbang agenda pekerjaan. Yang akrab di telinga sekaligus sebagai agenda kerja ekonomi adalah seputar pertumbuhan, daya saing, efisiensi dan lain-lain.

UKM, yang lebih akrab dengan perpaduan terminologi pertumbuhan dengan pemerataan, daya saing dengan solidaritas, dinilai tidak sesuai dengan semangat “perdagangan bebas”. Karena itu, banyak yang kemudian berpendapat bahwa UKM harus bisa mengejar atau bersaing dengan konglomerat. Jelas, ini merupakan kesalahan fatal dalam memandang UKM, sekaligus merupakan kekalahan “kubu” ekonomi kerakyatan dalam perang

¹⁰ Yuliana Idaranta, *Mengapa Kita Tidak Bisa Bersaing Dengan Melipat*, Kompas, 11/10/2007.

wacana melawan kapitalisme. UKM berbeda (berlawanan) dengan konglomerasi, baik bentuk, semangat, jiwa maupun tujuannya. Terlebih lagi, konglomerasi merupakan kapitalisme kroni yang secara substansial menyalahi sendi-sendi dasar kapitalisme itu sendiri.

3. Pembangunan Daerah

a. Pengertian pembangunan

Menurut Sondang P. Siagian yang dimaksud dengan pembangunan adalah sebagai berikut :

“Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa”¹¹.

Sedangkan Drs. I Nyoman Bharata mengatakan bahwa :

“Pembangunan itu tiada lain adalah suatu perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan pada norma-norma tertentu”.

Dari kedua pendapat diatas dapatlah disimpulkan bahwa pembangunan merupakan usaha perubahan yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk modernisasi. Pembangunan merupakan perubahan sosial yang bertujuan untuk menaikkan taraf hidup kearah lebih baik daripada sebelumnya.

Peningkatan taraf hidup masyarakat secara fisik dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang merupakan cermin keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Sesuai dengan ketetapan MPR No.II/MPR/1983, disebutkan bahwa :

¹¹ Sondang P. Siagian, *Administrasi pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1979, hal.2-3

“Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia, yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai”¹².

Dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan secara tegas dalam konteks pembangunan, pemerintah provinsi Banten memberikan perhatian khusus dan menjunjung tinggi aspek pembangunan dengan berpijak kepada (1). Prinsip-prinsip demokrasi (2). Partisipasi serta peran serta masyarakat. (3). Pemerataan dan keadilan, serta (4). Memperhatikan potensi dan keaneka ragam daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

4. Implementasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart Implementasi kebijakan adalah :

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program”¹³.

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keutaran maupun sebagai suatu dampak. Menurut Ripley dan Franklin Implementasi adalah :
“Apa yang terjadi setelah Undang-Undang ditetapkan yang memberikan

*otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata*¹⁴.

Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program (Gordon, 1986). Dalam hal ini, administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijaksanaan yang telah diseleksi.

- Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit, dan metode-metode untuk melaksanakan program.
- Menginterpretasikan berkenaan dengan menterjemahkan bahasa atau istila-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan *feasible*.
- Menerapkan berarti menggunakan instrument-instrumen, melakukan pelayanan rutin, pembayaran-pembayaran, atau merealisasi tujuan-tujuan program.

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program.

Dalam pelaksanaan ini terdapat berbagai hambatan antara lain ; (1). Bagaimana memupuk kerja sama dengan bawahan. (2). Bagaimana mengembangkan hubungan kerja yang baik antara bawahan dengan antara

atasan dengan bawahan; dan (3). Bagaimana mengatasi masalah penolakan terhadap perubahan.

Meurut Abdul Wahab, kesadaran akan arti penting telaah yang sistematis mengenai implementasi kebijakan Negara, baru muncul pada akhir tahun 1960-an atau lebih tepatnya pada awal tahun 1970-an di Amerika Serikat¹⁵.

Studi mengenai pelaksanaan kebijakan harus dibedakan dari evaluasi kebijakan, Santoso mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Analisis mengenai pelaksanaan kebijakan (Policy Implementation) mencoba mempelajari sebab-sebab kegagalan dan keberhasilan dan kegagalan kebijakan public melalui pembahasan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, seperti antara pelaksanaan kebijakan itu tidak hanya melibatkan juga masalah-masalah politik, dengan demikian studi implementasi kebijakan mencoba menjawab pertanyaan mengapa hal itu terjadi dan tidak berhenti hanya pada pertanyaan apa yang terjadi¹⁶.

Jelas sekali banyak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan, semua kebijakan Negara apapun bentuknya dimaksudkan untuk mempengaruhi dan mengontrol perbuatan masyarakat sesuai dengan aturan-aturan dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Suatu kebijakan pemerintah / Negara akan menjadi efektif bila dilaksanakan dan mempunyai dampak positif bagi masyarakat. Dengan kata lain tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota masyarakat itu bersesuaian dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara. Dengan demikian kalau

¹⁵ Abdul Wahab. *Pengantar Analisa Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta 1990, hal 122

¹⁶ Amir Santoso. *Jurnal Ilmu Politik 2 Suatu Pengantar*, Gramedia, Jakarta, 1980, hal 2

mereka tidak bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah, maka kebijakan tersebut menjadi tidak efektif.

Tugas dan kewajiban badan-badan pemerintah bukan hanya dalam perumusan kebijakan saja, tetapi juga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disahkan. Tanpa pelaksanaan maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan menjadi sia-sia. Oleh karena itulah pelaksanaan kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam proses kebijakan secara keseluruhan.

Selain dari pada itu, kebijakan yang hendak dijalankan adakalanya bertentangan dengan kebijakan lain, juga salah satu sebab dari suatu pelaksanaan yang tidak berhasil yaitu terletak pada kurangnya sumber-sumber pendukung antara lain waktu, uang, dan tenaga ahli.

Berdasarkan latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian dan dikaitkan dengan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli, maka variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi strategi pemberdayaan sektor usaha kecil menengah dan perekonomian rakyat adalah :

1. Sumber Daya, meliputi sumber dana, sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya alam.
2. Struktur Birokrasi, meliputi kordinasi, dan tingkat kewenangan.
3. Kondisi Lingkungan, meliputi jumlah penduduk, tingkat pendapatan

4. Sikap Pelaksana meliputi, persepsi pelaksana, kebutuhan dan sosialisasi pelaksana, kebutuhan dan sosialisasi program.

Berdasarkan asumsi tersebut akan mempengaruhi implementasi strategi pemberdayaan sektor usaha kecil menengah dan perekonomian rakyat.

5. Usaha Kecil Menengah dan Perekonomian Rakyat

a. Usaha Kecil Menengah (UKM)

Di Indonesia terdapat sejumlah departemen dan lembaga non departemen yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perumusan kebijaksanaan pengembangan UKM dan implementasinya (pelaksanaan program-program pembinaan), termasuk Menegkop & UKM, Menkeu, BAPPENAS, dan Deperindag. Walaupun dalam UU No. 9 / 1995 telah ditetapkan apa yang dimaksud dengan UK, dan melalui instruksi presiden (Inpres) No. 10 tahun 1999 mengenai definisi UM, namun dalam praktiknya, banyak diantara departemen dan badan pemerintah tersebut punya criteria sendiri-sendiri yang berbeda-beda dalam mendefinisikan UKM.

Di dalam UU No. 9 / 1999 tersebut ditetapkan bahwa Usaha Kecil (UK) adalah :

*“Suatu unit usaha yang mempunyai nilai asset neto (tidak termasuk tanah dan bangunan) yang tidak melebihi Rp. 200 juta, atau penjualan per tahun tidak lebih besar dari Rp. 1 miliar”.*¹⁷

¹⁷ Tulus Th Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2002

Sedangkan menurut Inpres No. 10 / 1999 tersebut Usaha Menengah (UM) adalah :

“Suatu unit usaha yang mempunyai nilai asset neto (diluar tanah dan gedung) antara Rp. 200 juta hingga Rp. 10 miliar, diatas itu adalah usaha besar (UB)”.¹⁸

Sedangkan menurut BPS (1998), IK adalah :

*“Unit usaha dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang termasuk pengusaha”*¹⁹.

b. Ekonomi Rakyat

Menurut Mubyarto (1997), ekonomi kerakyatan adalah :

*“sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat”*²⁰.

Sistem ekonomi kerakyatan tidak dapat dipisahkan dari pengertian “sektor ekonomi rakyat” Menurut Idris (1999), “sektor ekonomi rakyat adalah:

*“sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat rakyat banyak, pemilikan dan penilikan oleh rakyat banyak”*²¹.”

Berdasarkan pengertian ini terefleksi bahwa dalam ekonomi rakyat, masyarakat tidak hanya didorong untuk berpartisipasi dalam melakukan produksi dan menikmati hasil-hasilnya, tetapi juga memiliki, mengawasi, dan mengendalikan berlangsungnya proses produksi. Jumlah dan jenis sektor

¹⁸ *Ibid. hal 49*

¹⁹ *Ibid. hal 49*

ekonomi rakyat tidak terhitung jumlahnya, antara lain berbentuk usaha kecil, dan menengah (UKM)

E. DEFINISI KONSEPSIONAL

1. Strategi Kebijakan

keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu sejumlah sasaran organisasi dalam mencapai tujuan karena pemimpin organisasi berupaya untuk mencapai tujuan tertentu

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang di mana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program²².

3. Pembangunan Daerah

Pembangunan didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa²³.

²² Budi Winarno. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Media Presindo, Yogyakarta. 2007. hal 144

²³ Sondang P Siagian. *Administrasi pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta. 1979. hal 23

4. Usaha Kecil Menengah

Unit-unit usaha yang sifatnya tradisional, dalam arti tidak menerapkan system organisasi dan manajemen yang baik seperti lazimnya perusahaan modern, tidak ada pembagian tugas kerja dan pembukuan yang jelas.

5. Ekonomi Rakyat

sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat rakyat banyak, pemilikan dan penilikan oleh rakyat banyak

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah mengoperasikan definisi konsep guna mempermudah dalam melakukan kegiatan penelitian. Menurut Masri Singarimbun definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel itu di ukur. Maka perlu ada bahasan-bahasan penelitian dengan menentukan indikator-indikatornya. Indikator dari implementasi strategi pemberdayaan sektor usaha kecil menengah dan ekonomi rakyat di provinsi Banten adalah :

1. Kebijakan

- Pengembangan agribisnis perdesaan.

2. Program

- Pengembangan produk unggulan daerah.
- Pengembangan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan

- Peningkatan ketahanan pangan dan gizi.
- Pengembangan agribisnis.
- Peningkatan kesejahteraan petani.
- Pengembangan kapasitas kelembagaan UMKM-K.
- Pengembangan kapasitas kelembagaan dan tertib pelaksanaan pembangunan daerah.
- Pembinaan dan pengembangan kapasitas kelembagaan masyarakat, perempuan, pemuda, dan olahraga.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi

- Komunikasi
- Sumber daya
- Disposisi atau sikap pelaksana
- Struktur birokrasi

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian deskriptif eksploratif.

Metode penelitian deskriptif adalah :

Penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau, memusatkan diri pada pemecahan, masalah-masalah, data-data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan kemudian di analisa²⁴.

²⁴ Wicnana Sureshad, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit CV Tarsita, Bandung, 1989, hal 22

Sedangkan pengertian deskriptif eksploratif yaitu penelitian yang berusaha mencari, mengungkap hal-hal baru yang belum diungkap sebelumnya²⁵.

Dalam pelaksanaan penelitian ini diwujudkan dalam beberapa tahapan penelitian yang terdiri dari tahap persiapan, tahap penelitian lapangan, dan tahap analisis dan perumusan alternatif untuk pemecahan masalah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat penelitian skripsi ini adalah Provinsi Banten.

Adapun alasan penulisan untuk memilih Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Melihat Fenomena pembangunan daerah dan perkembangannya khususnya Provinsi Banten dalam hal mengimplementasikan strategi pemberdayaan sektor usaha kecil menengah dan ekonomi rakyat tahun 2006.

3. Unit Analisa

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai salah satu staf atau instansi terkait. Yang menjadi sasaran penelitian ini adalah Dinas Pertanian Prov. Banten

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data-data sebagai berikut :

²⁵ Tetapi banyak perbedaan definisi mengenai metode eksploratif ini seperti dalam buku Masri Singarimbun yang membenarkan definisi metode eksploratif berifat terbuka. Masih banyak lagi

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data melalui wawancara, penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian dengan daftar pertanyaan. Pertanyaan itu diajukan kepada orang / staf Dinas Pertanian Provinsi Banten.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, sebagai landasan teori serta literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, internet, undang-undang, serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Pemberdayaan Sektor Usaha Kecil dan ekonomi Rakyat di Provinsi Banten tahun 2006.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, digunakan tiga cara pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara (Interview)

Metode wawancara dimaksudkan menggali menentukan dan mencari informasi atau pendapat secara langsung dan lebih dari sumber informasi. Wawancara ini dilakukan dengan staf atau instansi terkait, yaitu kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten.

b. Pengamatan (Observasi)

Metode ini dimaksud untuk mengumpulkan data tentang gejala-gejala tertentu dengan jalan mengamatinya secara langsung

selama waktu tertentu, sedemikian rupa sehingga dapat diketahui apa yang berada di “belakang” dan apa yang ada di “muka”. Suatu gejala dengan observasi diharapkan akan diperoleh data dan informasi pendukung yang berupa sikap, pengetahuan yang tidak terkatakan dalam wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Pemberdayaan Sektor Usaha Kecil Menengah dan Ekonomi Rakyat di Provinsi Banten tahun 2006.

c. Dokumentasi

Menurut Sutrisno Hadi dokumentasi adalah tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan terhadap peristiwa itu dan ditulis secara sengaja untuk menyimpulkan atau meneruskan keterangan melalui peristiwa tersebut dalam data. Penelitian ini juga akan dicari dari sumber data yang berupa dokumentasi dari buku, internet, jurnal,, majalah, surat kabar, dan sumber lain²⁶.

Data yang berupa dokumentasi tersebut akan digunakan untuk menganalisis permasalahan sepanjang relevan dan membantu penelitian dalam mendeskripsikan hasil penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, mengenai penelitian bersifat kualitatif, Winarto

“Sifat dan bentuk penelitian ini adalah memutuskan dan menafsirkan data yang ada misalnya, tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecendrungan yang sedang nampak, pertentangan yang sedang memancing dan sebagainya”²⁷

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan buku berupa angka-angka, dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, dan sebagainya. Untuk memperoleh keabsahan dan penelitian ini diujikan untuk memperhatikan validitas, reabilitas dan objektivitas.